



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, DAN INDUSTRI)**

Tahun Sidang	:	2021- 2022
Masa Persidangan	:	III
Rapat	:	Ke - 29 (Duapuluh sembilan)
Jenis Rapat	:	<i>Courtesy Call</i>
Dengan	:	Anggota Komisi Bidang Energi Parlemen Denmark dan Duta Besar Denmark Untuk Indonesia
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 8 Maret 2022
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d 12.00 WIB
Tempat	:	Ruang Delegasi DPR-RI Gedung Nusantara III Lantai II, secara tatap muka
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">Progres RUU EBT;Kerja sama antara Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah dan Parlemen Negara Denmark;Pembelajaran proses transisi energi, percepatan investasi termasuk <i>foreign direct investment</i> (FDI) di EBT dan situasi geopolitik terkait energi sebagai dampak dari konflik antara Ukraina dan Rusia
Ketua Rapat	:	Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Nasdem)
Sekretaris Rapat	:	Dra. Nanik Herry Murti

Hadir

- : A. Stakeholder
1. PT PLN (Persero)
 - a. Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT PLN (Persero)
 - b. Wiluyo Kusdiharto, Direktur Mega Proyek PT PLN (Persero)
 - c. Evy Haryadi, Direktur Perencanaan PT PLN (Persero)
 2. PT Pertamina Power Indonesia
 - d. Dannif Danusaputro, Direktur Utama Pertamina Power Indonesia
 3. Parlemen Denmark
 - e. Rasmus Helveg Petersen, Ketua Komisi Parlemen Denmark untuk Energi, Utilitas dan Iklim
 - f. Anne Borch Paulin, Anggota Komisi Parlemen Denmark untuk Energi, Utilitas dan Iklim
 - g. Marie Bjerre Holst, Anggota Komisi Parlemen Denmark untuk Energi, Utilitas dan Iklim
 - h. Kim Valentin, Anggota Komisi Parlemen Denmark untuk Energi, Utilitas dan Iklim
 4. Duta Besar Denmark
 - i. Lars Bo Larsen, Duta Besar Denmark
 - j. Alex Newcombe, Perwakilan dari Agensi Denmark untuk Energi
- B. Peserta Rapat Komisi VII DPR-RI terdiri dari:
1. Dyah Roro Esti Widya Putri, Anggota Komisi VII DPR RI
 2. Mercy Christy Barends, Anggota Komisi VII DPR RI
 3. Nanik Hary Murti, Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII DPR RI
 4. Dwiyantri, Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi VII DPR RI;
 5. Sholihatta Aziz Kusumawan, Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. *Courtesy Call* Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 8 Maret 2022 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda *Courtesy Call* Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Progres RUU EBT;
 - b. Kerja sama antara Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah dan Parlemen Negara Denmark;

- c. Pembelajaran proses transisi energi, percepatan investasi termasuk *foreign direct investment* (FDI) di EBT dan situasi geopolitik terkait energi sebagai dampak dari konflik antara Ukraina dan Rusia

II. Pokok-pokok pembicaraan:

1. Ketua Komisi VII DPR RI menyampaikan, bahwa:

- a. dunia berada dalam tekanan dampak perubahan iklim yang nyata termasuk situasi menegangkan di Eropa yang saat ini berlangsung di mana ketahanan energi dan energi bersih adalah keharusan. Indonesia sudah mencapai *point of no return* dalam perubahan iklim dan ketahanan energi sehingga energi baru dan terbarukan adalah solusi konkrit.
- b. Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* dan NDC ke dalam dokumen legal penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement* atas UNFCCC yang didukung oleh Komisi VII DPR RI, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 29% atau *business as usual* (BAU) pada tahun 2030 dan dapat dinaikkan sampai 41% dengan kerja sama internasional.
- c. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mendukung *Paris Agreement* tersebut, diperlukan transisi energi primer seperti fosil menjadi energi ramah lingkungan yakni menggunakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target bauran EBT pada tahun 2025 ditargetkan mencapai 23% dan 31% pada tahun 2050.
- d. Komisi VII DPR RI sangat mendukung pengelolaan energi berkelanjutan di Indonesia karena saat ini fosil sudah menjadi masalah termasuk untuk perekonomian negara misalnya dikarenakan produksi minyak Indonesia yang belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri sehingga tingkat import BBM sangat tinggi.

- e. Indonesia juga sudah menyampaikan Komitmen Carbon Neutral pada tahun 2060.
2. **Direktur Utama PT PLN (Persero)** menyampaikan, bahwa:
 - a. Sektor kelistrikan Indonesia menyumbang 15% dari total emisi yang naik menjadi 0,92 miliar tCO₂e/tahun pada Tahun 2060 tanpa *abatement*.
 - b. Untuk mendukung carbon netral pada Tahun 2060. PT PLN (Persero) bersama dengan Kementerian ESDM merancang greenest RUPTL. Estimasi terbaik saat ini adalah pergeseran ke 66% berbasis EBT dan 26% teknologi CCS pada tahun 2060.
 - c. Investasi yang dibutuhkan PT PLN (Persero) untuk penambahan Energi Baru Terbarukan sebesar 500-600 miliar USD. PT PLN (Persero) tidak mampu handle investasi ini sendirian sehingga membutuhkan dukungan dari global. Dan transisi energi harus dilakukan dengan halus dengan mempertimbangkan ketahanan energi di Indonesia
 - d. Terdapat perubahan besar yang diperlukan menuju emisi net zero karbon: EBT skala besar dengan BESS, interkoneksi dan kluster industri hijau di daerah terpencil, Pembangkitan terdistribusi dengan EBT melalui PLTS Atap, battery storage dan smart grid, penerapan Carbon Capture and Storage (CCS), Early retirement PLTU melalui ETM, dan penerapan Teknologi baru seperti biomassa dan hidrogen.
 3. **Direktur Utama PT Pertamina Power Indonesia** menyampaikan, bahwa:
 - a. Perlunya kita belajar kepada Denmark yang telah berhasil melakukan transisi dari minyak dan gas bumi ke Energi Baru Terbarukan.
 - b. PT Pertamina (Persero) melakukan 8 inisiatif untuk mendukung energi hijau di Indonesia, diantaranya adalah:

- 1) Mengembangkan dan mengekspansi potensi geothermal di Indonesia
- 2) Membangun green refinery
- 3) Melakukan proyek gasifikasi
- 4) Membuat bio energi
- 5) Rencana penerapan circular carbon economy di berbagai bidang
- 6) Berpartisipasi dalam menciptakan ekosisten kendaraan listrik
- 7) Penerapan teknologi untuk mendukung dekarbonisasi.
- 8) Inisiasi penggunaan hidrogen hijau dari lapangan geothermal Pertamina.

4. Komisi Parlemen Denmark untuk Energi, Utilitas dan Iklim menyampaikan:

- a. Denmark memiliki pengalaman menyeluruh dengan integrasi energi terbarukan. Lebih dari 50 persen listrik yang dikonsumsi di Denmark berasal dari sumber daya yang berfluktuasi seperti PV surya dan angin. Dan keamanannya pasokan termasuk yang terbesar di dunia.
- b. Melalui kerja sama negara, Badan Energi Denmark siap membagikan semua pelajaran kelembagaan dan teknis yang diperoleh dari transisi Denmark dengan otoritas terkait di Indonesia.
- c. Denmark menargetkan untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 70% di tahun 2030 dengan ajuan tingkat karbon pada Tahun 1990 dan akan mencapai net zero emission pada tahun 2050.
- d. Pemerintah Denmark akan mengembangkan Rencana Aksi Iklim tahunan yang akan menguraikan kebijakan konkret untuk mengurangi emisi untuk semua sektor: energi, perumahan, industri, transportasi, efisiensi energi, pertanian, dan perubahan penggunaan lahan dan kehutanan.

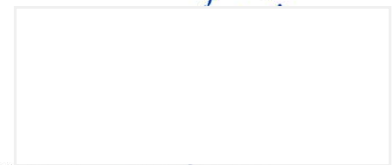
- e. Komisi VII DPR RI dan Komisi Parlemen Denmark untuk Energi, Utilitas dan Iklim sepakat untuk mencegah pemanasan bumi (climate change) dengan menekan emisi karbon yang mengedepankan energi baru terbarukan, dan secara bertahap meninggalkan energi fosil untuk mencapai zero emission di tahun 2060 atau lebih cepat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 8 Maret 2022

KETUA RAPAT,



SUGENG SUPARWOTO

A-373